

## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

#### A. Simpulan

Berikut peneliti jabarkan beberapa hasil kesimpulan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Berdasarkan hasil dari indeks ketahanan perbankan Syariah (*Syariah banking robustness index*) terdapat ketahanann yang buruk pada tahun 2004 dan 2005, namun saat terjadi krisis global pada tahun 2008, kondisi perbankan Syariah tetap stabil dan pergerakannya tidak menyentuh ambang batas (*threshold*) yang telah di tetapkan oleh peneliti sebesar 1, 1,5 dan 2. Buruknya ketahanan perbankan Syariah pada tahun 2004 disebabkan oleh guncangan dari internal perbankan Syariah.
2. Berdasarkan hasil dari sistem deteksi dini dengan menganalisis indeks ketahanan perbankan Syariah (*Syariah banking robustness index*), dari 5 indikator yang digunakan dalam penelitian ini seperti inflasi, PDB, NPF, FDR dan suku bunga, terdapat beberapa *leading indicators* yang dapat digunakan untuk mengamati ketahanan perbankan Syariah di Indonesia, diantaranya adalah suku bunga, inflasi dan *financing to depofits ratio* (*FDR*). Penentuan *leading indicators* ini berdasarkan penilain beberapa kriteria seperti *noise to signal ratio* (*NSR*), *The proportion of crises correctly called*, *The proportion of false alarm of total alarms*, *The proportion of crisis given an alarm issued* dan *The proportion of Prob of*

*Crisis given no alarm.* Berdasarkan ketiga *leading indicators* yang terdapat dalam model sinyal ini, indikator suku bunga menjadi indikator yang paling sempurna dalam memberikan potensi guncangan terhadap perbankan Syariah di Indonesia dikarenakan memiliki nilai kriteria *noise to signal ratio (NSR)* terkecil dan variabel ini mampu memberikan proporsi akurasi ketepatan dalam memberikan peringatan terjadinya guncangan sebesar 100 sinyal yang tepat dari 100 sinyal yang muncul.

3. Berdasarkan 3 *leading indicators* yang ditemukan dengan menggunakan pendekatan logit, hanya indikator suku bunga yang dapat berpotensi memberikan kemungkinan (*Probability*) terjadinya guncangan pada perbankan Syariah di Indonesia.

## **B. Saran Kebijakan**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dijabarkan sebelumnya, maka pemerintah perlu memperhatikan berbagai *leading indicators* yang berpotensi memberikan potensi risiko terhadap ketahanan perbankan Syariah di Indonesia. Berdasarkan berbagai *leading indicators*, berikut saran kebijakan yang peneliti sarankan kepada otoritas terkait dalam hal ini Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia perlu memperhatikan dampak yang diakibatkan jika menentukan tingkat suku bunga acuan, karena indikator suku bunga sangat sensitif terhadap perkembangan perbankan Syariah. Jika tingkat bagi hasil yang digunakan oleh perbankan Syariah tidak kompetitif dengan suku bunga acuan, maka perbankan Syariah akan kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Disamping itu, Bank Indonesia perlunya melonggarkan kebijakan moneter terutama tingkat suku bunga, penurunan suku bunga ini berpotensi untuk menyelamatkan aktivitas perekonomian domestik Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian global yang tidak stabil. Jika suku bunga tinggi ditengah kelesuan ekonomi global, maka akan membahayakan aktivitas perbankan nasional karena tingkat kredit macet akan tinggi. Penurunan tingkat suku bunga acuan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan memperkuat ketahanan perekonomian domestik dari kondisi perekonomian global yang tidak stabil.

2. Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi secara nasional, maka perlu koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak-pihak terkait, baik di daerah maupun di pusat. Pihak-pihak yang terkait dengan inflasi salah satu diantaranya adalah tim pengendali inflasi daerah (TPID). Bank Indonesia perlu melibatkan TPID dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan Inflasi. Disamping itu, Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Provinsi ataupun pemerintah Kota/Kabupaten, koordinasi ini diperuntukkan guna memaksimalkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dengan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan cepat mendapatkan berbagai Informasi yang terkait setiap kebijakan yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Jika informasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah sempurna, maka pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di daerah.
3. Terkait dengan indikator *financing to deposits ratio (FDR)* Bank Indonesia perlu memaksimalkan berbagai instrumen kebijakan makroprudensial seperti, giro wajib minimum *financing to deposit ratio*(GWM FDR) dan *countercyclical capital buffer (CCB)*. Kedua kebijakan ini akan dapat meningkatkan kualitas dari likuiditas perbankan Syariah. Dengan kondisi likuiditas yang baik, peran serta fungsi perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan maksimal.

### **C. Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya memasukkan variabel kondisi politik sebagai salah satu variabel penelitian, hal ini dikarenakan variabel non ekonomi dalam hal ini kondisi politik, memiliki potensi sebagai indikator yang dapat mempengaruhi kondisi perbankan Syariah.
2. Perlunya pengembangan berbagai model pendekatan sistem deteksi dini seperti pendekatan jaringan saraf buatan, pendekatan makroprudensial dan mikroprudensial, markov switching, fuzzy logit, dan berbagai permodelan lainnya. Pengembangan berbagai model ini guna menyempurnakan model yang telah digunakan dalam penelitian ini.